

## Hingga Februari 2024, Realisasi Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan Capai Rp 5,95 Triliun



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/04/24/hingga-februari-2024-realisis-pendapatan-daerah-kalsel-capai-rp595-triliun/>

Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan (Kalsel) sampai dengan 29 Februari 2024, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,95 triliun atau sekitar 15,67 persen dari target, meningkat sebesar 99,46 persen jika dibandingkan tahun lalu.

Kepala Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafriadi menyebutkan bahwa Pajak Daerah terealisasi Rp755,38 Miliar dan Retribusi Daerah sebesar Rp48,73 miliar. Realisasi pendapatan tertinggi ada pada Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp624,78 miliar (19,82 persen).

“Pajak daerah dan retribusi daerah mengalami kenaikan, disumbang dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang meningkat secara signifikan. Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah se-Kalsel adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp4,89 Triliun, dengan kontribusi 82,33 persen terhadap total pendapatan Daerah,” kata Syafriadi.

Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, menurut Syafriadi, realisasi belanja telah terealisasi sebesar Rp2,48 triliun (5,95 persen) tumbuh 36,72 persen. Belanja pegawai telah terealisasi sebesar Rp951,80 Miliar. Untuk Belanja Barang atau Jasa sebesar Rp497,32 Miliar, belanja modal telah terealisasi sebesar Rp83,79 Miliar.

“Belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal meningkat dibandingkan 2023. Peningkatan paling tinggi pada belanja barang/jasa yaitu mencapai 88,15 persen jika dibandingkan tahun lalu. Realisasi belanja APBD terbesar di Januari 2024 adalah Pemerintah Provinsi Kalsel sebesar Rp1,13 triliun (9,72 persen),” ucap Syafridi.

Sementara itu, untuk penyaluran KUR sampai dengan 29 Februari 2024 terealisasi sebesar Rp783,19 Miliar kepada 13.365 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami pertumbuhan yang positif dengan persentase growth mencapai 399,90 persen dibandingkan periode Februari 2023.

“Kabupaten/Kota penyalur KUR tertinggi di Februari 2024 adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin merupakan kota dengan penyaluran KUR tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp183,50 Miliar yang disalurkan kepada 2.491 debitur,” tambahnya.

Diakui, capaian tersebut meningkat 174,79 persen dibandingkan periode Februari 2023. BRI merupakan Bank/LKBB penyalur dengan penyaluran KUR tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp546,12 Miliar yang disalurkan kepada 11.224 debitur. Selanjutnya adalah Bank Kalsel sebesar Rp103,89 Miliar dan Bank Mandiri sebesar Rp68,26 Miliar.

Sedangkan untuk penyaluran UMi hingga 29 Februari 2024 terealisasi sebesar Rp3,66 Miliar kepada 730 debitur. Nominal penyaluran tersebut mengalami peningkatan sebesar 61,96 persen dibandingkan periode Februari 2023. Kota Banjarmasin merupakan Kabupaten/Kota dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi per Februari tahun 2024 dengan nominal sebesar Rp904 juta yang disalurkan kepada 182 debitur.

Capaian tersebut meningkat 127,19 persen dibandingkan periode Februari 2023. PT PNM (Permodalan Nasional Madani) merupakan LKBB dengan penyaluran pembiayaan UMi tertinggi dengan realisasi per Februari tahun 2024 sebesar Rp3,28 Miliar kepada 691 debitur, kemudian Pegadaian menyalurkan sebesar Rp382,23 juta kepada 39 debitur.

#### **Sumber berita:**

1. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2024/04/24/hingga-februari-2024-realisasi-pendapatan-daerah-kalsel-capai-rp595-triliun/>, 24 April 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/164539/meningkat-realisasi-pendapatan-daerah-kalsel-capai-rp595-triliun-hingga-februari-2024>, 24 April 2024.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu